

# Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Kurangi Kemiskinan

**P**ENGELUARAN pemerintah merupakan salah satu instrumen untuk mengerakkan perekonomian sebuah negara, disamping konsumsi yang dilakukan masyarakat dan investasi yang dilakukan sektor swasta. Sehingga sangat diharapkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan disegala bidang. Dengan adanya efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah, maka pemerintah turut andil secara langsung mengurangi kemiskinan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan setuju sepenuhnya bahwa cara alokasi dan pembelanjaan sumber dana pemerintahan merupakan salah satu kunci utama untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun kenyataannya, Erry melihat cenderung perencanaan pembelanjaan suatu instansi tidak efektif dan efisien. Maksudnya, ketika perencanaan dalam suatu instansi pemerintah disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dengan pertimbangan-pertimbangan untuk menguntungkan sebagian orang.

"KPK melihat efisiensi dan tidak efektifnya pengeluaran pemerintah bukan sebagai masalah yang berdiri sendiri, melainkan sebagai salah satu akibat dari maraknya korupsi," ujar Erry Riyana dalam acara *Poverty Alleviation in Indonesia* beberapa waktu lalu di Jakarta. Penyusunan perencanaan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, lanjutnya, banyak pihak tidak menganggapnya sebagai tindakan korupsi dengan alasan tidak ada prosedur baku yang dilanggar.

Anggapan itu terjadi, ujar mantan Direktur Utama PT. Timah Tbk, berdasarkan berbagai hasil survei

menyimpulkan belum terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga sistem pemerintahan dan bahkan sistem peradilan terjebak pada korupsi yang sifatnya sistematis dan institusional. "Sebagai gambaran kita sering melihat korupsi hanya sebagai sebuah delik tindak pidana," katanya. Padahal, tindakan korupsi juga dapat terjadi dalam penataan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

## Standar dan prosedur baku

UU tentang Keuangan Negara, sambung Erry, merupakan langkah maju yang sangat penting. Kendati demikian, UU tersebut masih perlu dielaborasi untuk bisa secara efektif diterapkan. Memang disadari bahwa diperlukan waktu untuk menerapkan standar dan prosedur baru karena kompleksitas masalah manajemen pengeluaran pemerintah, selain juga karena kurangnya kapasitas para manajernya sendiri.

Dulu, pemerintah memakai pemisahan 'perencanaan' dengan 'penganggaran' serta mekanisme pemisahan belanja rutin dan belanja pembangunan. Tindakan pemisahan ini telah membawa tiga akibat. Akibat pertama, perubahan kebijakan, penyusunan standar kinerja dan capital expenditures dilakukan melalui pengaturan administratif yang terpisah dari 'penganggaran'. "Kebanyakan cara ini gagal. Atau tidak dapat memprediksi hasil dari pengeluaran pemerintah," ujar Erry Riyana.

Akibat kedua, formula penetapan anggaran mengakibatkan sebagian besar institusi pemerintah dan pemerintah daerah kekurangan dana dan disisi lainnya kelebihan dana. Akibat terakhir, tidak seluruh anggaran dapat dikenalkan oleh Depertemen Keuangan,

karena anggaran lembaga ditetapkan dengan formula tertentu dan tidak adanya pertimbangan yang cukup dalam penetapan anggaran.

Erry memaparkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah memperkenalkan *single budget* menggantikan pemisahan anggaran rutin-pembangunan. Disamping itu juga memperkenalkan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sesuai dengan *Medium Term Expenditures Framework* (MTEF) atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), serta memberi wacana evaluasi anggaran berdasarkan kinerja. Demikian pula dengan UU No. 1 Tahun 2004 yang memperkuat beberapa aspek operasional seperti ketentuan manajemen anggaran dan perencanaan keuangan, manajemen utang dan aset serta sistem pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*).

"Jadi sesungguhnya kita telah memiliki kerangka dasar hukum yang memadai untuk mengatur pengeluaran pemerintah. Dasar hukum kita juga telah disesuaikan dengan tuntutan praktik internasional dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," terang pria lulusan S1 Tahun 1978 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat ini.

## Pembiayaan daerah

Selanjutnya, ujar pria kelahiran Bandung, Gross Regional Product (GRP) dan indikator-indikator kemiskinan seperti indeks pembangunan manusia (*human development index*) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara satu daerah dan lainnya. Melalui UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), pembagian pendapatan dari kekayaan alam, serta pinjaman daerah.

Data yang ada menunjukkan pada tahun 2005 hanya 7% anggaran pemda dibiayai daerah melalui PAD. Sehingga ketergantungan pemda pada alokasi dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. "Dalam arti sumber utama daerah adalah alokasi DAU dan pembagian pendapatan dari kekayaan alam," jelas pria yang pernah meraih tanda jasa Satyalancana Pembangunan (1996) dan Bintang Jasa Utama (1997) dari Presiden RI atas dedikasi dan prestasinya dalam mengembangkan industri pertambangan di Indonesia.

Karena tidak semua daerah memiliki cukup pendapatan dari kekayaan alam, Erry menguraikan maka lebih dari setengah jumlah pemda mengandalkan sekitar 90% anggarannya pada alokasi DAU. Oleh karena itu perlu dicari alternatif cara alokasi DAU untuk mengurangi disparitas antar daerah. Sehingga pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan daerah, mencegah daerah dari menetapkan pajak dan retribusi daerah yang menghambat datangnya investasi dan mengundang praktik korupsi.

Beberapa hambatan terkait pembiayaan daerah antara lain persyaratan daerah tidak akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih rendah daripada tahun lalu. Ini membatasi fungsi redistribusi DAU sendiri. Hambatan lainnya pembiayaan pegawai daerah dan masalah formula bagi hasil. Kurangnya akuntabilitas yang diciptakan oleh alokasi juga menjadi masalah.

## Perlu dicari alternatif cara alokasi DAU untuk mengurangi disparitas antar daerah.

Hal lain yang menjadi isu utama pengurangan kemiskinan adalah alokasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam jajaran pemerintah pusat dan daerah. Kurangnya kapasitas SDM menjadi problem disebagian besar pemerintah daerah. Hal ini besar pengaruhnya bagi efektifitas pengeluaran daerah untuk memangkas kemiskinan. Terkait dengan manajemen SDM, rendahnya gaji PNS sering dijadikan alasan berbagai keterbatasan dan maraknya korupsi.

Sehingga, reformasi SDM mencakup

lebih dari sekedar menaikkan gaji pengawai. Sebab masih ada masalah yang harus dipikirkan dan dicari solusinya yaitu masalah rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengukuran kinerja, pengembangan karier, kode etik, hak keuangan serta pengaturan pemutusan hubungan kerja.

"KPK menyambut baik respon pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka pembaruan tata kelola pemerintahan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan," tegas pria yang pernah menjabat Direktur PT. Tambang Batubara Bukit Asam (1982-1991). Erry menekankan KPK akan selalu membantu dalam kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya bagi keberhasilan tata kelola pemerintahan. Menuju praktik tata kelola pemerintahan yang baik, agar perekonomian negara tumbuh secara signifikan sekaligus ramah bagi kaum papa.

(len)

# Menristek Tawarkan Solusi Waduk Resapan Atasi Banjir di Jakarta

KEMENTERIAN Negara Riset dan Teknologi menawarkan konsep waduk resapan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi banjir di Jakarta sekaligus menambah kemampuan ibukota untuk memiliki persediaan air baku bagi kepentingan air minum warga.

"Kita lebih melihat mengenai air yang langsung dibuang ke laut, kita sudah identifikasi dan ternyata di Jakarta terdapat jalur-jalur sungai purba," kata Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT Kusmayanto Kadiman usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota Jakarta, Jumat (2/3).

Dipaparkannya untuk menampung air, akan dibuat waduk-waduk yang tidak hanya menampung air tapi juga dapat menjadi resapan air, kemudian air resapan itu masuk ke jalur-jalur yang telah diidentifikasi sebagai jalur sungai purba di Jakarta.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan, tim dari Kementerian Riset dan Teknologi memberikan masukan yang baik bagi penanganan banjir di Jakarta.

"Kita harus konsisten dalam penanganan dan pencegahan banjir di Jakarta, jangan sampai setelah air surut, surut juga semangatnya," katanya.

Untuk konsep yang diajukan oleh Kementerian Ristek tersebut dibutuhkan 40 waduk resapan dengan total luas wilayah 810 hektar antara lain untuk Kali Sunter berada di Kelurahan Halim Perdama Kusuma bagian timur Run Way seluas 60 hektar, Kelurahan Setu seluas 40 hektar.

Waduk Resapan di sekitar Kali Cipinang antara lain di Halim Perdama Kusuma seluas 8 hektar. Untuk Kali Buaran waduk resapan berada di kelurahan Penggilingan seluas 30 hektar, Sungai Ciliwung untuk waduk resapan diusulkan di kelurahan Sukmajati 100 hektar, Citayam 150 hektar dan Bojong gede 200 hektar.

Untuk Kali Mampang, waduk resapan berada di Kalibata Pulo 4 hektar dan Buncit Raya permai 6 hektar. Untuk Kali Krakut, waduk resapan berada di Kelurahan Cilandak Timur 15 hektar, Kelurahan Pondok Labu 6 hektar, Kelurahan Cigandul 30 hektar.

Sedangkan untuk kali Grogol, waduk resapan diusulkan di Kelurahan Lebak Bulus seluas 20 hektar dan Kelurahan Grogol seluas 4 hektar. Kali Pesanggarahan, waduk resapan diusulkan di Sawangan Baru seluas 100 hektar. Kali Angke, waduk resapan diusulkan di Pondok Kacang seluas 15 hektar dan Parigi Baru seluas 50 hektar.